

Anteseden Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Kabupaten/Kota di Jawa Tengah

Ika Neni Kristanti

ikanenikristanti@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Belanja Modal terhadap Produk Domestik Regional Bruto di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. Metode penelitian yang digunakan yaitu statistik deskriptif dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik dan Direktorat Jenderal Perimbangan provinsi Jawa Tengah. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah sampel jenuh yaitu seluruh populasi dijadikan sampel. Sampel yang diperoleh sejumlah 105 laporan realisasi APBD serta PDRB Harga Konstan di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. Metode analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda dengan menggunakan program SPSS. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum berpengaruh positif signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto, sedangkan Dana Alokasi Khusus dan Belanja Modal tidak berpengaruh terhadap Produk Domestik Regional Bruto.

Kata kunci: Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Belanja Modal dan Produk Domestik Regional Bruto.

Abstract

The purpose of this study was to understand of Regional Original Income. General Fund Allocation, Specific Fund Allocation, and Capital Expenditure to Gross Regional Domestic Product in distric or urban Province of Central Java. The research method used was descriptive statistics using secondary data obtained from Central Statistics Agency and Directorate General of Financial Balance Province of Central Java. The technique sampling in this study was saturation sample that the population was sample size. The sample obtained was 105 reports of budget relization and GRDP at Constant Market Price distric or urban Province of Central Java. The analysis method used was multiple linear regression models using SPSS. The result of this research showed that Regional Original Income. General Fund Allocation have a significant positive effect on Gross Regional Domestic Product, while Specific Fund Allocation and Capital Expenditure have no effect on Gross Regional Domestic Product.

Keywords: *Regional Original Income. General Fund Allocation, Specific Fund Allocation, Capital Expenditure, and Gross Regional Domestic Product.*

PENDAHULUAN

Otonomi daerah merupakan pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Dengan diberlakukannya sistem otonomi daerah, maka pemerintah daerah dalam melaksanakan urusan di daerahnya mempunyai wewenang untuk menentukan arah pembangunan daerahnya tanpa campur tangan dari pemerintah pusat. Diberlakukannya otonomi daerah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah karena memberikan kebebasan kepada masing-

masing daerah untuk membuat rencana keuangannya sendiri dan membuat kebijakan-kebijakan yang dapat berpengaruh pada kemajuan daerahnya. Dalam pelaksanaan pembangunan tersebut diperlukan kemampuan dalam mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang merupakan tugas pokok dan fungsi unit kerja sehingga anggaran daerah merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan seluruh proses perencanaan pembangunan daerah.

APBD dapat didefinisikan sebagai rencana operasional keuangan pemerintah daerah, dimana di satu pihak menggambarkan perkiraan pengeluaran setinggi-

tingginya guna membiayai kegiatan-kegiatan dan proyek-proyek daerah dalam satu tahun anggaran tertentu, dan di pihak lain menggambarkan perkiraan penerimaan dan sumber-sumber penerimaan daerah guna menutupi pengeluaran-pengeluaran (Halim, 2013:21). Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) digunakan sebagai alat untuk menentukan besarnya pendapatan dan pengeluaran, membantu dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan, dan sebagai ukuran standar untuk evaluasi kinerja.

Laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terdapat unsur pendapatan dan belanja. Pemerintah daerah memiliki kebebasan dalam pengambilan keputusan dalam hal pendapatan daerah, sehingga pemerintah daerah memerlukan dukungan sumber keuangan yang salah satunya berasal dari Pendapatan Asli Daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Pendapatan daerah yang meningkat merupakan gambaran pertumbuhan ekonomi daerah tersebut meningkat pula. Selain PAD, dana perimbangan berupa Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (Undang-Undang No.33 Tahun 2004). Sedangkan Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional (Undang-Undang No.33 Tahun 2004).

Pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran belanja modal dalam APBD untuk menambah aset tetap. Belanja Modal/Investasi adalah pengeluaran yang manfaatnya cenderung melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan pemerintahan, dan selanjutnya akan menambah anggaran rutin untuk biaya operasional dan pemeliharaannya (Mardiasmo, 2018: 83). Belanja modal memiliki peran penting dalam meningkatkan infrastruktur publik, sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi dapat didefinisikan sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang di produksi dalam masyarakat bertambah (Sukirno, 2012). Pertumbuhan ekonomi dapat mengukur prestasi dari perkembangan perekonomian suatu daerah. Pengukuran kemajuan perekonomian suatu daerah memerlukan alat ukur yang tepat, berupa alat pengukur pertumbuhan ekonomi antara

lain yaitu Produk Domestik Bruto (PDB) atau tingkat regional disebut Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang menggambarkan kemampuan suatu wilayah untuk menciptakan nilai tambah pada suatu waktu tertentu (Jawa Tengah Dalam Angka 2019). PDRB pada dasarnya merupakan nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit dalam suatu daerah tertentu atau merupakan nilai jumlah barang dan jasa akhir (neto) yang dihasilkan oleh suatu unit ekonomi.

Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada masing-masing daerah berbeda-beda. Hal ini disebabkan adanya beberapa faktor, antara lain perbedaan kepemilikan sumber daya alam, perbedaan jumlah penduduk, dan perbedaan jumlah tenaga kerja antar daerah. Dalam PDRB menurut Provinsi di Pulau Jawa, Rata-rata pertumbuhan PDRB Jawa Tengah sebesar 5,325%, cukup tinggi. Namun apabila dibandingkan dengan provinsi lain di Pulau Jawa masih kalah bersaing dengan Provinsi DKI Jakarta yang memiliki rata-rata pertumbuhan PDRB tertinggi sebesar 6,0375%. Kemudian Provinsi lainnya dengan rata-rata pertumbuhan PDRB yang lebih tinggi dari Jawa Tengah adalah D.I. Yogyakarta dengan pertumbuhan PDRB sebesar 5,365%, Provinsi Jawa Barat dengan pertumbuhan PDRB sebesar 5,425%, Provinsi Jawa Timur dengan pertumbuhan PDRB sebesar 5,4925%, dan Provinsi Banten dengan pertumbuhan PDRB sebesar 5,5675%. Kesimpulannya adalah bahwa Provinsi Jawa Tengah memiliki rata-rata pertumbuhan PDRB paling rendah di Pulau Jawa dengan jarak cukup jauh rata-rata pertumbuhan PDRBnya dengan provinsi lain.

Berdasarkan uraian diatas, Provinsi Jawa Tengah memiliki rata-rata pertumbuhan ekonomi paling rendah di Pulau Jawa selama empat tahun terakhir. Adanya perbedaan hasil penelitian dari penelitian terdahulu, yaitu Oktafia *et al.* (2018) menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) memiliki pengaruh positif signifikan terhadap PDRB. Dewi dan Suputra (2017) menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) memiliki pengaruh negatif dan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Belanja Modal tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Dan penelitian Yuliana (2014) menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Belanja Modal memiliki pengaruh positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Maka penulis tertarik untuk menganalisa Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) Dan Belanja Modal Terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Di Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Produk Domestik Regional Bruto di Kabupaten/Kota di Jawa Tengah?

2. Bagaimana pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Produk Domestik Regional Bruto di Kabupaten/Kota di Jawa Tengah?
3. Bagaimana pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Produk Domestik Regional Bruto di Kabupaten/Kota di Jawa Tengah?
4. Bagaimana pengaruh Belanja Modal terhadap Produk Domestik Regional Bruto di Kabupaten/Kota di Jawa Tengah?

TINJAUAN PUSTAKA

Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi didefinisikan sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang di produksi dalam masyarakat bertambah (Sukirno, 2012:9). Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi atau pertumbuhan ekonomi di suatu daerah dalam periode tertentu ditunjukkan oleh data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan.

Produk Domestik Regional Bruto

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan jumlah nilai produk barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit produksi di dalam suatu wilayah atau daerah pada suatu periode tertentu, biasanya satu tahun (Kuncoro, 2004). PDRB pada dasarnya merupakan nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit dalam suatu daerah tertentu atau merupakan nilai jumlah barang dan jasa akhir (neto) yang dihasilkan oleh suatu unit ekonomi. PDRB atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku setiap tahun serta diperuntukkan sebagai gambaran untuk melihat pergeseran dan struktur ekonomi. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung dengan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai dasarnya serta diperuntukkan melihat pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun.

Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pasal 1 ayat 18 menyatakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Menurut Darise (2006:43), Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dana Alokasi Umum

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-daerah untuk mendanai kebutuhan daerah

dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Dana Alokasi Umum (DAU) ditetapkan berdasarkan presentase tertentu dari penerimaan dalam negeri yang ditetapkan dalam APBN. DAU diberikan pemerintah pusat untuk membiayai kekurangan dari pemerintah daerah dalam memanfaatkan pendapatan asli daerahnya.

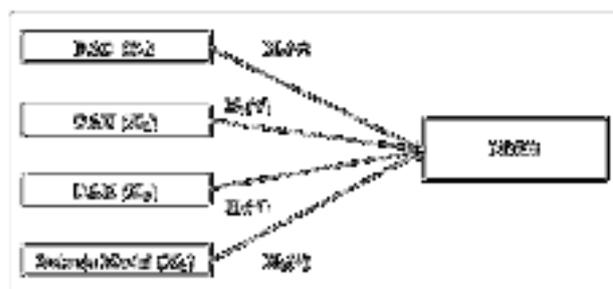
Dana Alokasi Khusus

Menurut Halim (2002:65), Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk membantu membiayai kebutuhan tertentu. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan pada Pasal 19 yang membahas lebih rinci tentang Dana Alokasi Khusus, disebutkan bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) dapat dialokasikan dari APBN kepada daerah tertentu untuk membantu membiayai kebutuhan khusus dengan memperhatikan tersedianya dalam APBN. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005, dijelaskan bahwa daerah yang akan menerima DAK harus memenuhi tiga kriteria, yaitu kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis.

Belanja Modal

Belanja Modal yaitu biaya yang dikeluarkan untuk pembelian barang-barang modal yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan, antara lain pembelian tanah, gedung, mesin dan kendaraan, peralatan, instalasi dan jaringan, furniture, software, dan sebagainya (Mahmudi, 2010: 96). Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap/inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk didalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, serta meningkatkan kapasitas dan kualitas aset.

Kerangka Pemikiran



Gambar II.1 Kerangka Pemikiran

Hipotesis

- H_1 : Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap Produk Domestik Regional Bruto
- H_2 : Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif terhadap Produk Domestik Regional Bruto
- H_3 : Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh positif terhadap Produk Domestik Regional Bruto

H₄ : Belanja Modal berpengaruh positif terhadap Produk Domestik Regional Bruto

METODE PENELITIAN

Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder.

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah yang berjumlah 35, dalam kurun waktu 3 tahun, sehingga berjumlah 105.

Sampel dalam penelitian ini yaitu seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah yang berjumlah 35 dalam kurun waktu 3 tahun, sehingga berjumlah 105. Namun, karena ada beberapa data *outliers* yang menyebabkan data tidak normal maka data *outliers* tersebut dihapus, sehingga jumlah datanya yaitu 100.

Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan metode dokumentasi. Data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data yang bersumber dari Laporan Realisasi APBD Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah yang diperoleh dari situs Dirjen Perimbangan Keuangan Pemerintah Daerah.

Variabel Penelitian

- Variabel dependen (terikat) merupakan variabel yang nilainya dipengaruhi oleh variabel bebas. Pada penelitian ini variabel terikatnya adalah Produk Domestik regional Bruto (PDRB) Kabupaten/Kota di Jawa Tengah dalam kurun waktu tiga (3) tahun dari 2016 sampai dengan 2018. Data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) diperoleh dari website Badan Pusat Statistik www.bps.go.id.
- Variabel independen (bebas) adalah variabel yang mempengaruhi variabel terikat. Variabel independen dalam penelitian ini adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Belanja Modal Kabupaten/Kota di Jawa Tengah dalam kurun waktu tiga (3) tahun dari 2016 sampai dengan 2018. Data variabel independen dalam penelitian ini diperoleh dari website Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan www.djpk.kemenukeu.go.id.

Metode Analisis Data

a. Statistik Deskriptif

Menurut Sugiyono (2010:147), statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat

kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.

b. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik adalah analisis yang dilakukan untuk menilai apakah di dalam sebuah model regresi linier terdapat masalah-masalah asumsi klasik atau tidak. Uji yang dilakukan yaitu:

1. Uji Normalitas
2. Uji Multikolinierita
3. Uji Autokorelasi
4. Uji Heterokedastisitas

c. Uji Hipotesis

1. Analisis Linier Berganda

Analisis Regresi Linier Berganda digunakan untuk meramalkan bagaimana (naik turunnya) variabel dependen apabila dua atau lebih variabel independen sebagai faktor prediktor dimanipulasi (Sugiyono, 2009:277). Model persamaan analisis regresi linier berganda dalam penelitian ini adalah:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \varepsilon \dots \dots \dots (1)$$

Keterangan :

Y : Pertumbuhan Ekonomi (PDRB)

: Konstanta

X₁ : Pendapatan Asli Daerah

X₂ : Dana Alokasi Umum

X₃ : Dana Alokasi Khusus

X₄ : Belanja Modal

ε : Error

β₁ β₂ β₃ β₄ : Koefisien regresi untuk masing-masing variabel

2. Uji Statistik t

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas/independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2018:98). Kriteria pengujian yang digunakan dengan membandingkan nilai signifikan yang diperoleh dengan taraf signifikan yang telah ditentukan yaitu 0,05. Apabila nilai signifikan < 0,05 maka variabel independen mampu mempengaruhi variabel dependen secara signifikan atau hipotesis diterima.

3. Uji Statistik F

Uji statistik F digunakan untuk pengujian hipotesis semua variabel independen yang dimasukkan dalam model berpengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen dan juga untuk menentukan model kelayakan model regresi. Pengujian ini dilakukan dengan melihat nilai probabilitas signifikansi (Sig.) F yang dibandingkan dengan batas signifikansi yang ditetapkan yaitu sebesar 0,05 (5%). Apabila nilai signifikansi < 0,05 maka variabel independen secara bersama-sama mampu mempengaruhi variabel dependen.

4. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji Koefisien Determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model regresi dalam menerangkan variasi variabel.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif

Tabel IV.1 Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PDRB	02	12,74	14,12	13,2731	24704
PAD	02	11,23	12,26	11,5168	17636
DAU	02	11,64	12,15	11,9643	13055
DAK	02	10,75	11,68	11,3910	21333
Uji Normalitas	02	1,02	2,1	1,5643	176,6

Sumber: Data yang diolah, 2019

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) memiliki nilai rata-rata (*mean*) selama tiga tahun terakhir sebesar 13,2731 dengan nilai minimum sebesar 12,74 yang dimiliki oleh Kota Magelang pada tahun 2016 dengan jumlah PDRB sebesar Rp 5.521.525.538.147,28 dan nilai maksimum sebesar 14,12 yang dimiliki oleh Kota Semarang pada tahun 2018 dengan jumlah PDRB sebesar Rp 131.137.259.650.000,00. PDRB memiliki nilai standar deviasi sebesar 0,24704 lebih kecil dari rata-rata (*mean*) 13,2731, menunjukkan bahwa distribusi data cenderung normal.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki nilai rata-rata (*mean*) selama tiga tahun sebesar 11,5168 dengan nilai minimum sebesar 11,23 yang dimiliki oleh Kabupaten Blora pada tahun 2016 dengan jumlah PAD sebesar Rp 171.277.522.706 dan nilai maksimum 12,26 yang dimiliki oleh Kota Semarang pada tahun 2018 dengan jumlah PAD sebesar Rp 1.821.274.103.250. Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki nilai standar deviasi sebesar 0,17636 lebih kecil dari nilai rata-rata (*mean*) 11,5168, menunjukkan bahwa distribusi data cenderung normal.

Dana Alokasi Umum (DAU) memiliki nilai rata-rata (*mean*) selama tiga tahun terakhir sebesar 11,9643 dengan nilai minimum sebesar 11,64 yang dimiliki oleh Kota Magelang pada tahun 2017 dan 2018 dengan jumlah DAU sebesar Rp 440.041.244.000 dan nilai maksimum sebesar 12,15 yang dimiliki oleh Kabupaten Banyumas pada tahun 2016 dengan jumlah DAU sebesar Rp 1.398.539.653.000. Dana Alokasi Umum (DAU) memiliki nilai standar deviasi sebesar 0,13055 lebih kecil dari nilai rata-rata (*mean*) 11,9643, menunjukkan bahwa distribusi data cenderung normal.

Dana Alokasi Khusus (DAK) memiliki nilai rata-rata (*mean*) selama tiga tahun terakhir sebesar 11,3910 dengan nilai minimum sebesar 10,75 yang dimiliki oleh

Kabupaten Magelang pada tahun 2017 dengan jumlah DAK sebesar Rp 56.452.309.000 dan nilai maksimum sebesar 11,68 yang dimiliki oleh Kabupaten Cilacap pada tahun 2016 dengan jumlah DAK sebesar Rp 483.813.446.054. Dana Alokasi Khusus (DAK) memiliki nilai standar deviasi sebesar 0,22333 lebih kecil dari rata-

rata (*mean*) 11,3910, menunjukkan bahwa distribusi data cenderung normal.

Belanja Modal memiliki nilai rata-rata (*mean*) selama tiga tahun terakhir sebesar 11,5643 dengan nilai minimum sebesar 11,06 yang dimiliki oleh Kota Tegal pada tahun 2018 dengan jumlah Belanja Modal sebesar Rp 113.622.507.976 dan nilai maksimum sebesar 12,11 yang dimiliki oleh Kota Semarang pada tahun 2017 dengan jumlah Belanja Modal sebesar Rp 1.275.359088.966. Belanja Modal memiliki nilai standar deviasi sebesar 0,17616 lebih kecil dari rata-rata (*mean*) 11,5643, menunjukkan bahwa distribusi data cenderung normal.

Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Tabel IV.2 Hasil Pengujian One-Sample Kolmogorov-Smirnov

Model	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
PAD	,488	2,049
DAU	,279	3,580
DAK	,438	2,281
BM	,426	2,345

Sumber: Data yang diolah, 2019

Berdasarkan tabel IV.2 tersebut, menunjukkan bahwa besarnya nilai signifikansi Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,200 > 0,05 maka sesuai dengan dasar pengambilan keputusan di atas, dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal.

2. Uji Multikolonieritas

Tabel IV.3 Hasil Pengujian Multikolonieritas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
PAD	,488	2,049
DAU	,279	3,580
DAK	,438	2,281
BM	,426	2,345

a. Dependent Variable: PDRB

Sumber: Data yang diolah, 2019

Berdasarkan Tabel IV.3, terlihat bahwa variabel independen yaitu Pendapatan Asli daerah (PAD), Dana

Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Belanja Modal masing-masing memiliki nilai *tolerance* kurang dari 0,10 dan nilai *varian inflation factor (VIF)* masing-masing kurang dari 10. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa model yang terbentuk tidak terdapat adanya gejala multikolonieritas antar variabel independen dalam model regresi.

3. Uji Autokorelasi

Tabel IV.4 Hasil Pengujian Run Test

	Unstandardized Residual
Test Value ^a	-,00466
Cases < Test Value	50
Cases >= Test Value	50
Total Cases	100
Number of Runs	44
Z	-1,407
Asymp. Sig. (2-tailed)	,159

a. Median

Sumber: Data yang diolah, 2019

Berdasarkan Tabel IV.6 diatas, menunjukkan nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,159 yang lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa hasil uji autokorelasi berdasarkan Uji *Run Test* juga tidak terdapat gejala atau masalah autokorelasi.

4. Uji Heterokedastisitas

Tabel IV.5 Hasil Pengujian Glejser

	Unstandardized Residual	Standardized Residual	Unstandardized Residual	Standardized Residual
Test Value ^a	0,319	0,818	0,502	0,683

Sumber: Data yang diolah, 2019

Berdasarkan tabel IV.5 dapat dilihat bahwa nilai signifikan untuk keempat variabel yaitu Pendapatan Asli Daerah sebesar 0,319, Dana Alokasi Umum sebesar 0,818, Dana Alokasi Khusus sebesar 0,502 dan Belanja Modal sebesar 0,683. Hasil tersebut menunjukkan bahwa nilai signifikan masing-masing variabel independen lebih dari 0,05 maka dapat disimpulkan tidak terjadi gejala heterokedastisitas dalam model regresi.

Uji Hipotesis

1. Analisis Regresi Linier Berganda

Tabel IV.6 Hasil Pengujian Regresi Linier Berganda

	Unstandardized Residual	Standardized Residual	Unstandardized Residual	Standardized Residual
Test Value ^a	0,000	0,000	0,000	0,000

Sumber: Data yang diolah, 2019

Berdasarkan Tabel IV.8 , dapat disusun persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = -6,238 + 0,900PAD + 0,815DAU - 0,046DAK - 0,007BM + \epsilon... (2)$$

Dari persamaan di atas, dapat dijelaskan bahwa:

1. Nilai konstanta (α) sebesar -6,238 menyatakan bahwa pada saat variabel independen yaitu Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Belanja Modal bernilai 0 (nol) maka Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) bernilai -6,238.
2. Nilai koefisien Pendapatan Asli Daerah 0,900 menjelaskan bahwa setiap tambahan 1,00 Pendapatan Asli Daerah (X_1) akan meningkatkan Produk Domestik Regional Bruto (Y) sebesar 0,900 dengan asumsi variabel independen lainnya adalah tetap.
3. Nilai koefisien Dana Alokasi Umum 0,815 menjelaskan bahwa setiap tambahan 1,00 Dana Alokasi Umum (X_2) akan meningkatkan Produk Domestik Regional Bruto (Y) sebesar 0,815 dengan asumsi variabel independen lainnya adalah tetap.
4. Nilai koefisien Dana Alokasi Khusus -0,046 menjelaskan bahwa setiap terjadi penurunan 1,00 Dana Alokasi Khusus (X_3) akan menurunkan Produk Domestik Regional Bruto (Y) sebesar 0,046 dengan asumsi variabel independen lainnya adalah tetap.
5. Nilai koefisien Belanja Modal -0,007 menjelaskan bahwa setiap terjadi penurunan 1,00 Belanja Modal (X_4) akan menurunkan Produk Domestik Regional Bruto (Y) sebesar 0,007 dengan asumsi variabel independen lainnya adalah tetap.

2. Uji Statistik t

Tabel IV.7 Hasil Uji t

	Unstandardized Residual	Standardized Residual	Unstandardized Residual	Standardized Residual
Test Value ^a	0,000	0,000	0,000	0,000

Sumber: Data yang diolah, 2019

Disimpulkan bahwa uji hipotesis secara parsial dari masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen adalah sebagai berikut:

- a. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Produk Domestik Regional Bruto
 H_1 : Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap Produk Domestik Regional Bruto
 Hasil uji t pada Tabel IV.9 , menunjukkan bahwa probabilitas signifikansi untuk variabel independen Pendapatan Asli Daerah (X_1) sebesar 0,000 lebih kecil dari nilai signifikan 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa H_1 diterima , artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara Pendapatan Asli Daerah terhadap Produk Domestik Regional Bruto. Sehingga semakin besar kontribusi Pendapatan Asli Daerah maka semakin besar pula Produk Domestik Regional Bruto. Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu sumber pembelanjaan daerah, salah satunya

belanja modal. Apabila Pendapatan Asli Daerah meningkat, maka dana yang dimiliki daerah akan meningkat pula. Adanya Pendapatan Asli Daerah yang tinggi pemerintah daerah akan berinisiatif untuk lebih menggali potensi-potensi daerah yang dimiliki untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Oktafia, dkk (2018), Putri (2015) dan Yuliana (2014) dimana Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi (PDRB) sehingga ketika Pendapatan Asli Daerah yang dihasilkan pemerintah daerah meningkat maka PDRB di daerah tersebut juga akan meningkat. Namun hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Dewi dan Suputra (2017) yang menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi.

b. Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Produk Domestik Regional Bruto

H_2 : Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif terhadap Produk Domestik Regional Bruto

Hasil uji t pada Tabel IV.9, menunjukkan bahwa probabilitas signifikansi untuk variabel independen Dana Alokasi Umum (X_2) sebesar 0,000 lebih kecil dari nilai signifikansi 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa H_2 diterima, artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara Dana Alokasi Umum terhadap Produk Domestik Regional Bruto. Sehingga semakin besar kontribusi Dana Alokasi Umum maka semakin besar pula Produk Domestik Regional Bruto. Hal ini disebabkan karena setiap Dana Alokasi Umum (DAU) yang diterima pemerintah daerah akan ditujukan untuk belanja pemerintah daerah, salah satunya adalah untuk belanja modal yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana oleh pemerintah daerah akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Oktafia et al. (2018) dan Permanasari (2013) dimana Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Namun, hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Dewi dan Suputra (2017) yang menyatakan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

c. Pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Produk Domestik Regional Bruto

H_3 : Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh positif terhadap Produk Domestik Regional Bruto

Hasil uji t pada Tabel IV.9, menunjukkan bahwa probabilitas signifikansi untuk variabel independen Dana Alokasi Khusus (X_3) sebesar 0,497 lebih besar dari nilai signifikansi 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa H_3 ditolak, artinya tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara Dana Alokasi Khusus terhadap Produk Domestik Regional Bruto. Hasil

tersebut menunjukkan bahwa besar kecilnya Dana Alokasi Khusus tidak akan berpengaruh terhadap Produk Domestik Regional Bruto. Hasil ini disebabkan karena Dana Alokasi Khusus yang diterima oleh pemerintah daerah ditujukan hanya untuk kegiatan khusus yang telah ditentukan oleh pemerintah pusat. Sehingga pemerintah daerah tidak dapat menggunakan Dana Alokasi Khusus untuk kegiatan diluar kegiatan khusus yang sifatnya dapat membantu pertumbuhan pertumbuhan ekonomi daerah tersebut.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Permanasari (2013) dimana Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Namun, hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Yeni et al. (2015) dan Oktafia et al. (2018) yang menyatakan bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh positif signifikan terhadap Produk Domestik regional Bruto (PDRB).

d. Pengaruh Belanja Modal terhadap Produk Domestik Regional Bruto

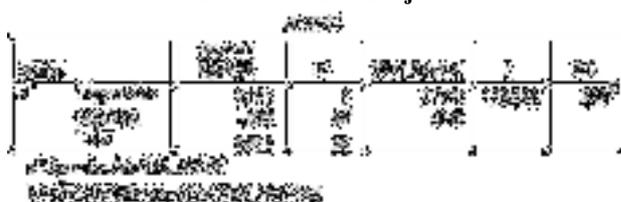
H_4 : Belanja Modal berpengaruh positif terhadap Produk Domestik Regional Bruto

Hasil uji t pada Tabel IV.9, menunjukkan bahwa probabilitas signifikansi untuk variabel independen Belanja Modal (X_4) sebesar 0,938 lebih besar dari nilai signifikansi 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa H_4 ditolak, artinya tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara Belanja Modal terhadap Produk Domestik Regional Bruto. Hasil tersebut menunjukkan bahwa besar kecilnya Belanja Modal tidak akan berpengaruh terhadap Produk Domestik Regional Bruto. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yaitu belanja modal yang digunakan pemerintah daerah dialokasikan pada belanja infrastruktur yang kurang produktif. Selain itu juga dapat disebabkan hasil alokasi belanja modal belum dapat dinikmati dalam kurun waktu yang pendek atau pembangunan infrastruktur masih berjalan sehingga belum memperoleh hasil dari belanja modal tersebut.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Wardhiah (2018) dan Dewi dan Suputra (2017) dimana Belanja Modal tidak berpengaruh terhadap PDRB Kabupaten/Kota di Aceh. Namun, penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Yuliana (2014) yang menyatakan bahwa belanja modal berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

3. Uji Statistik F

Tabel IV.8 Hasil Uji F



Sumber: Data yang diolah, 2019

Berdasarkan Tabel IV.8 , diperoleh nilai tingkat signifikansi 0,000 yang menunjukkan $< 0,05$. Maka dapat disimpulkan bahwa secara bersama-sama variabel Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Belanja Modal berpengaruh signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto di Provinsi Jawa Tengah.

4. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel IV.9 Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary ^a				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.938 ^a	.879	.838	1.152

a. Predictors: (Constant), DAU, DAK, PAD

b. Dependent Variable: PDRB

Sumber: Data yang diolah, 2019

Berdasarkan Tabel IV.11 , menunjukkan bahwa besarnya Adjusted *R Square* adalah 0,838, hal ini berarti 83,8% Produk Domestik Regional Bruto dipengaruhi oleh variabel Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Belanja Modal. Sedangkan sisanya 15,2% dipengaruhi oleh variabel lain yang belum diteliti dalam penelitian ini.

PENUTUP

Kesimpulan

Simpulan menyajikan ringkasan dari uraian mengenai hasil dan pembahasan, mengacu pada tujuan penelitian. Berdasarkan kedua hal tersebut dikembangkan pokok-pokok pikiran baru yang merupakan esensi dari temuan penelitian. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Variabel Pendapatan Asli Daerah (X_1) berpengaruh positif terhadap Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah dengan nilai signifikansi 0,000 lebih kecil dari nilai signifikansi 0,05. Hasil tersebut menunjukkan bahwa apabila Pendapatan Asli Daerah meningkat maka Produk Domestik Regional Bruto juga mengalami peningkatan.
2. Variabel Dana Alokasi Umum (X_2) berpengaruh positif signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah dengan nilai signifikansi pada uji t sebesar 0,000 lebih kecil dari nilai signifikansi 0,05. Hasil tersebut menunjukkan bahwa apabila Dana Alokasi Umum meningkat maka Produk Domestik Regional Bruto juga mengalami peningkatan.
3. Variabel Dana Alokasi Khusus (X_3) tidak berpengaruh terhadap Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah yang ditunjukkan dengan nilai signifikansi pada uji t sebesar 0,497 lebih besar dari nilai signifikansi 0,05. Hasil tersebut menunjukkan bahwa ketika Dana Alokasi Khusus mengalami peningkatan ataupun

penurunan tidak akan mempengaruhi Produk Domestik Regional Bruto.

4. Variabel Belanja Modal (X_4) tidak berpengaruh terhadap Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah yang ditunjukkan dengan nilai signifikansi pada uji t sebesar 0,938 lebih besar dari nilai signifikansi 0,05. Hasil tersebut menunjukkan bahwa ketika Belanja Modal mengalami peningkatan ataupun penurunan tidak akan mempengaruhi Produk Domestik Regional Bruto.

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan diatas, maka penulis memberi saran sebagai berikut:

- a. Bagi Pemerintah Daerah
 1. Untuk meningkatkan Produk Domestik Regional Bruto maka pemerintah daerah diharapkan terus menggali sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah yang ada di wilayahnya secara intensif.
 2. Pemerintah daerah diharapkan dapat lebih memanfaatkan Dana Alokasi Umum untuk kegiatan-kegiatan yang memiliki potensi lebih untuk meningkatkan Produk Domestik Regional Bruto.
- b. Bagi Penelitian Selanjutnya

Untuk peneliti selanjutnya diharapkan penelitian ini dapat menjadi acuan untuk melakukan penelitian berikutnya dengan memperluas ruang lingkup penelitian dan menambah variabel independen lain yang diduga dapat mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi baik berupa variabel keuangan maupun non-keuangan yang belum diteliti dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, M. L., S. M. Palar, dan J. I. Sumual. 2016. Pengaruh DAU, DAK, PAD Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan (Kota Manado 2001-2013). *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*. 16(02): 218-232.
- Bahri, S. 2018. *Metodologi Penelitian Bisnis*. ANDI. Yogyakarta.
- Darise, N. 2007. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. PT. INDEKS.
- DAU Pegang Peranan Penting untuk Pembangunan Daerah. <https://keuda.kemendagri.go.id>. Diakses pada 15 Oktober 2019.
- Dewi, N. W. R. dan I. D. G. D. Suputra. 2017. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi. *E-Jurnal*

- Akuntansi Universitas Udayana*. 18(3): 1745-1773.
- Ghozali. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariatif Dengan Program SPSS 19*. Cetakan 8. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- _____. 2018. *Aplikasi Analisis Multivariatif Dengan Program SPSS 25*. Edisi 9. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Halim, A. 2002. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat. Jakarta.
- Halim, A., dan M. S. Kusufi. 2012. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat. Jakarta.
- _____. 2013. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat. Jakarta.
- Kuncoro, M. 2004. *Otonomi Dan Pembangunan Daerah*. Erlangga. Jakarta.
- Laporan Realisasi Anggaran. www.djpk.kemenkeu.go.id Diakses 2 Oktober 2019. Pukul 13:00.
- Mahmudi. 2010. *Manajemen Keuangan Daerah*. PT. Gelora Aksara Pratama. Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2018. *Akuntansi Sektor Publik*. ANDI. Yogyakarta.
- Nur'aeni, Y. Dan Suratno. 2015. Pengaruh PAD, DAU, DAK dan DOK Terhadap Produk Domestik Regional Bruto. *Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan*. 2(1): 32-42.
- Oktafia, A. M., A. Soelistiyo, dan Z. Arifin. 2018. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Ilmu Ekonomi*. 2(1): 53-62.
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 *Dana Perimbangan*. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 *Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing*. Jakarta.
- Permanasari, W. A. 2013. Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Skripsi Sarjana (Publikasi) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Prayitno, H. 1986. *Pengantar Ekonomika Pembangunan*. Edisi 1. BPFE. Yogyakarta.
- Produk Domestik Regional Bruto. <https://jateng.bps.go.id> Diakses 27 September 2019. Pukul 20:00.
- Provinsi Jawa Tengah Dalam Angka 2019. <https://jateng.bps.go.id/publication> Diakses 27 September 2019. Pukul 19:00.
- Putri, Z. E. 2015. Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Bisnis dan Manajemen*. 5(2): 173-186.
- Sejarah Provinsi Jawa Tengah. www.ptun-semarang.go.id Diakses 18 Desember 2019. Pukul 13:00.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Bisnis*. Cetakan 14. Alfabeta. Bandung.
- _____. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Cetakan 11. Alfabeta. Bandung.
- _____. 2018. *Metode Penelitian Manajemen*. Cetakan 6. Alfabeta. Bandung.
- Sukirno, S. 2012. *Makroekonomi Teori Pengantar*. Cetakan 21. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *Pemerintah Daerah*. Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 *Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah*. Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 *Pajak dan Retribusi Daerah*. Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 104 Tahun 2000 *Dana Perimbangan*. Jakarta.
- Wardhiah. 2018. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Aceh. *Jurnal Visioner & Strategis*. 7(1): 61-70.
- Yuliana. 2014. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*. 5(1): 33-48.